

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR: PER- 01 /PK/2013

TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN ATAS LEBIH SALUR
DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2013

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan Dan Pemotongan Atas Lebih Salur Dana Bagi Hasil Yang Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN ATAS LEBIH SALUR DANA BAGI HASIL PADA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada

Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari Sumber Daya Alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
4. Lebih salur DBH adalah selisih lebih dari DBH yang telah disalurkan ke daerah dengan DBH yang dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 2

- (1) Lebih salur DBH diperhitungkan dengan cara pemotongan terhadap DBH jenis yang sama pada penyaluran triwulan I dan/atau triwulan II tahun anggaran 2013.
- (2) Dalam hal lebih salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan seluruhnya, maka sisa lebih salur diperhitungkan terhadap jenis dana transfer lainnya yang penggunaannya tidak diarahkan (bersifat *non-earmarked*) pada penyaluran triwulan II tahun anggaran 2013.
- (3) DBH dan dana transfer lainnya yang penggunaannya tidak diarahkan meliputi:
 - a. DBH Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - b. DBH Pajak Penghasilan Pasal 25/29;
 - c. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pusat;
 - d. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Migas;
 - e. DBH Pajak Bumi dan Bangunan Panas Bumi;
 - f. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Migas;
 - g. Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Panas Bumi;
 - h. DBH SDA Minyak Bumi (15%);
 - i. DBH SDA Gas Bumi (30%);
 - j. DBH SDA Pertambangan Umum Iuran Tetap;



- k. DBH SDA Pertambangan Umum Royalti;
- l. DBH SDA Kehutanan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
- m. DBH SDA Kehutanan Provisi Sumber Daya Hutan;
- n. DBH SDA Perikanan; dan
- o. Dana Alokasi Umum.

Pasal 3

Perhitungan dan prioritas pemotongan terhadap DBH dan jenis dana transfer lainnya dilakukan sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Daftar daerah dan rincian lebih salur DBH tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Rincian lebih salur DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai dasar bagi:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran Transfer ke Daerah untuk memperhitungkan lebih salur dalam penyaluran Anggaran Transfer ke Daerah tahun anggaran 2013; dan
- b. Pemerintah Daerah untuk memperhitungkan penerimaan DBH pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013.

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 2013

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP 19590606 198312 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM



BERLIN PANJAITAN

NIP 19571207 198003 1 001

PRIORITAS PERHITUNGAN/PEMOTONGAN ATAS LEBIH SALUR
DANA BAGI HASIL (DBH) S.D. TAHUN 2012

NO	JENIS TRANSFER DBH YANG MENGALAMI LEBIH SALUR	DBH PAJAK										JENIS TRANSFER YANG AKAN DIPOTONG										DAU
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
1	PPh Pasal 21	1	2	4	3	5	-	-	6	-	-	7	-	-	8	9	10	11	-	12	13	
2	PPh Pasal 25/29	2	1	4	3	5	-	-	6	-	-	7	-	-	8	9	10	11	-	12	13	
3	PBB Bagian Pusat	4	5	1	2	3	-	-	6	-	-	7	-	-	8	9	10	11	-	12	13	
4	PBB Migas	4	5	3	1	2	-	-	6	-	-	7	-	-	8	9	10	11	-	12	13	
5	PBB Panas Bumi	4	5	3	2	1	-	-	6	-	-	7	-	-	8	9	10	11	-	12	13	
6	BP-PBB Migas	6	7	5	3	4	1	2	8	-	-	9	-	-	10	11	12	13	-	14	15	
7	BP-PBB Panas Bumi	6	7	5	3	4	2	1	8	-	-	9	-	-	10	11	12	13	-	14	15	
8	SDA Minyak Bumi 15%	11	12	10	8	9	-	-	1	-	-	2	-	-	3	4	5	6	-	7	13	
9	SDA Minyak Bumi 0,5%	12	13	11	9	10	-	-	2	1	-	3	-	-	4	5	6	7	-	8	14	
10	SDA Gas Bumi 30%	11	12	10	8	9	-	-	2	-	-	3	-	-	4	5	6	7	-	8	14	
11	SDA Gas Bumi 0,5%	12	13	11	9	10	-	-	3	-	-	4	-	-	5	6	7	8	-	9	14	
12	SDA Gas Bumi dalam Rangka Otsus	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
13	SDA Pertambangan Umum Iuran Tetap	11	12	10	8	9	-	-	3	-	-	4	-	-	1	2	5	6	-	7	13	
14	SDA Pertambangan Umum Royalti	11	12	10	8	9	-	-	3	-	-	4	-	-	2	1	5	6	-	7	13	
15	SDA Kehutanan IIUPH	11	12	10	8	9	-	-	3	-	-	4	-	-	5	6	1	2	-	7	13	
16	SDA Kehutanan PSDH	11	12	10	8	9	-	-	3	-	-	4	-	-	5	6	2	1	-	7	13	
17	SDA Kehutanan DR	12	13	11	9	10	-	-	4	-	-	5	-	-	6	7	2	1	-	8	14	
18	SDA Perikanan	11	12	10	8	9	-	-	2	-	-	3	-	-	4	5	6	7	-	1	13	

Keterangan:

Angka pada kolom (3) sampai dengan kolom (22) menunjukkan prioritas jenis transfer yang akan dipotong. Angka 1 berarti prioritas pemotongan pertama, angka 2 berarti prioritas pemotongan kedua, angka 3 berarti prioritas pemotongan ketiga, dan seterusnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL



DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

ttt.

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP 19590606 198312 1 001



NIP 19571207 198003 1 001

NO.	DAERAH	DBH Pajak				DBH SDA Minyak Bumi		DBH SDA Gas Bumi		DBH SDA Pertambangan Umum		DBH SDA Kehutanan			JUMLAH
		611111	611112	611121/611122	611123/611124	612111	612112	612211	612212	612311	612312	612511	612512	612516	
		PPH Pasal 21	PPH Pasal 25/29	PBB	BP PBB	Minyak 15%	Minyak 0,5%	Gas 30%	Gas 0,5%	Iuran Tetap	Royalti	IUPH	PSDH	DR	
48	Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.950.567
49	Kab. Srik	7.215.448.245	52.792.968	-	-	-	-	29.459.574	490.993	-	-	-	-	-	7.298.191.780
50	Kota Dumai	-	-	-	-	-	-	29.459.574	490.993	-	-	-	-	-	29.950.567
51	Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	29.459.574	490.993	-	-	-	-	-	29.950.567
52	Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	29.459.574	490.993	-	-	-	-	-	29.950.567
53	Provinsi Kepulauan Riau	10.101.900.347	927.667.308	5.018.855.003	167.295.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.215.117.826
54	Kab. Bintan	1.956.210.861	111.126.302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.067.337.163
55	Kab. Natuna	-	-	25.229.347.897	840.978.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.070.326.159
56	Kota Batam	16.375.507.990	835.334.937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.210.842.927
57	Kab. Lingga	684.003.456	80.583.727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	764.587.183
58	Kab. Kepulauan Anambas	1.001.274.030	87.434.111	19.807.522.050	660.250.733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.556.480.924
59	Provinsi Jambi	-	-	230.974.196	11.548.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.522.907
60	Kab. Kerinci	-	-	1.024.457.565	29.880.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.054.337.578
61	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	4.423.398.244	129.015.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.552.414.025
62	Provinsi Sumatera Selatan	-	111.973.328	1.974.750.834	54.854.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.141.578.351
63	Kab. Musi Banyuasin	3.480.706.278	85.032.057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.565.738.335
64	Kab. Musi Rawas	-	1.441.466	979.047.908	33.994.719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.014.484.093
65	Kab. Muara Enim	657.101.436	145.520.970	6.919.955.427	240.276.229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.962.854.062
66	Kab. Ogan Komering Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	44.317.140	-	-	-	-	286.901.918
67	Kab. Ogan Komering Ulu	-	2.796.571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.796.571
68	Kota Palembang	-	251.923.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.923.675
69	Kota Pagar Alam	-	1.092.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.092.202
70	Kota Prabumulih	1.174.313.544	185.017.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.359.331.180
71	Kab. Banyuasin	814.210.190	107.452.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	921.662.963
72	Kab. Ogan Ilir	-	-	-	-	-	-	-	-	57.478.400	-	-	-	-	57.478.400
73	Kab. OKU Timur	-	3.272.228	-	-	-	-	-	-	44.589.672	-	-	-	-	47.861.900
74	Kab. OKU Selatan	-	3.214.215	-	-	-	-	-	-	70.823.970	-	-	-	-	74.038.185
75	Kab. Empat Lawang	-	2.712.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.712.896
76	Kab. Bangka	384.543.062	3.382.603	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387.925.665
77	Kab. Bangka Tengah	84.716.628	5.961.756	-	-	-	-	-	-	271.812.497	-	-	-	-	271.812.497
78	Kab. Belitung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.764.007
79	Provinsi Bengkulu	-	-	77.190.973	2.573.034	-	-	-	-	17.640.000	-	-	-	-	17.640.000
80	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.556
81	Kab. Kaur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347.556
82	Kab. Seluma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438.246
83	Kab. Mukomuko	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.262.386
84	Kab. Lebong	-	-	496.192.575	16.539.753	-	-	-	-	2.912.000	-	-	-	-	512.732.328
85	Kab. Kepahiang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.912.000
86	Provinsi Lampung	-	-	78.009.338	2.600.312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.609.650
87	Kab. Lampung Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	9.720.690	-	-	-	-	9.720.690
88	Kab. Lampung Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	14.267.680	-	-	-	-	14.267.680
89	Kab. Tanggamus	-	-	312.037.350	10.401.245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322.438.595
90	Kab. Tulang Bawang	-	264.414.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.414.832
91	Kab. Mesuji	-	-	611.876.972	20.395.897	-	-	-	-	-	-	-	-	-	632.272.869
92	Kab. Bandung	-	-	2.007.205.490	79.451.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.086.657.372
93	Kab. Bekasi	30.281.514.855	6.580.172.354	1.600.740.999	63.362.661	-	-	-	-	17.348.800	-	-	-	-	38.525.790.809
94	Kab. Purwakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	10.160.586	-	-	-	-	10.160.586
95	Kab. Sukabumi	-	-	499.636.686	19.777.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519.413.972
96	Kota Bandung	-	142.666.991	264.532.510	10.471.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	417.670.578
97	Kota Bekasi	-	-	140.471.001	5.560.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.031.310
98	Kota Depok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.771.486
99	Kota Cimahi	-	20.771.486	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.771.486
100	Kab. Bandung Barat	-	2.184.127	626.806.504	24.811.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	653.801.721
101	Kab. Tangkang	-	331.676.539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331.676.539
102	Kota Tangerang	-	102.368.548	157.750.721	5.258.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265.377.624

(dalam rupiah)

NO.	DAERAH	DBH Pajak					DBH SDA Minyak Bumi		DBH SDA Gas Bumi		DBH SDA Pertambangan Umum		DBH SDA Kehutanan		JUMLAH
		611111	611112	611121/611122	611123/611124	612111	612112	612211	612212	612311	612312	612511	612512	612516	
		PPH Pasal 21	PPH Pasal 25/29	PBB	BP PBB	Minyak 15%	Minyak 0,5%	Gas 30%	Gas 0,5%	Iuran Tetap	Royalti	IUPPH	PSDH	DR	
158	Kab. Barito Kuala	-	-	-	-	-	-	-	-	3.360.000	-	-	-	-	3.360.000
159	Kab. Kotabaru	3.518.693.143	93.745.078	-	-	-	-	-	-	13.868.526	-	-	-	-	3.612.438.221
160	Kab. Tabalong	960.977.329	431.383.472	-	-	-	-	-	-	51.501.520	-	-	-	-	1.406.229.327
161	Kota Banjarbaru	-	3.837.543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.339.063
162	Kab. Tanah Bumbu	153.511.190	89.779.629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243.290.819
163	Kab. Tanah Karawang	3.621.026.530	-	8.042.557.932	279.255.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.942.839.944
164	Kab. Kutai Barat	1.433.042.517	12.848.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445.890.999
165	Kab. Kutai Timur	7.175.638.657	90.495.890	-	-	-	-	-	-	409.289.047	-	-	-	-	7.266.134.547
166	Kota Bontang	12.147.198.997	394.335.095	-	-	-	-	-	-	13.888.000	-	-	-	-	12.950.823.139
167	Kota Tarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.888.000
168	Kab. Penajam Paser Utara	88.606.203	16.065.283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.671.486
169	Kab. Balaang Mongondow	116.261.663	14.133.180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.394.843
170	Kab. Minahasa Selatan	261.943.423	24.057.602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.001.025
171	Kab. Minahasa Tenggara	38.091.205	13.455.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.546.250
172	Kab. Balaang Mongondow Selatan	-	-	244.649.238	7.645.287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.294.525
173	Kab. Balaang Mongondow Timur	-	-	159.615.984	4.988.000	-	-	-	-	14.021.752	10.080.000	-	-	-	178.625.736
174	Provinsi Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	2.240.000	4.032.000	-	-	-	10.080.000
175	Kab. Boalemo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.032.000	-	-	-	6.272.000
176	Kab. Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.032.000	-	-	-	4.032.000
177	Kota Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.032.000	-	-	-	4.032.000
178	Kab. Pohuwato	-	-	-	-	-	-	-	-	27.488.112	20.160.000	-	-	-	47.665.530
179	Kab. Bone Bolango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.032.000	-	-	-	4.032.000
180	Kab. Gorontalo Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.032.000	-	-	-	4.032.000
181	Kab. Toi-Toi	454.004.813	47.108.877	-	-	-	-	-	-	-	4.032.000	-	-	-	501.113.690
182	Kab. Sigi	-	-	-	-	-	-	-	-	13.464.745	-	-	-	-	13.464.745
183	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	342.759.600	5.712.400	-	-	-	-	-	348.472.000
184	Kab. Bantareng	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
185	Kab. Barru	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	6.432.000	-	-	-	-	36.733.200
186	Kab. Bone	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	1.191.300	-	-	-	-	31.492.500
187	Kab. Bulukumba	-	15.386.822	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	45.688.022
188	Kab. Enrekang	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	10.135.790	-	-	-	-	40.436.990
189	Kab. Gowa	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
190	Kab. Jeneponto	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	1.205.540	-	-	-	-	31.506.740
191	Kab. Luwu	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	111.603.501	-	-	-	-	141.904.701
192	Kab. Luwu Utara	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
193	Kab. Maros	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	13.723.360	-	-	-	-	44.024.560
194	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
195	Kab. Pinrang	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
196	Kab. Kepulauan Selayar	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
197	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	27.418.930	-	-	-	-	57.720.130
198	Kab. Sinjai	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	3.129.035	-	-	-	-	33.430.235
199	Kab. Soppeng	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
200	Kab. Takalar	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	3.439.625	-	-	-	-	33.740.825
201	Kab. Tana Toraja	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
202	Kab. Wajo	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	1.918.595	-	-	-	-	698.862.995
203	Kota Pare-pare	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
204	Kota Makassar	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
205	Kota Palopo	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	12.187.385	-	-	-	-	42.488.585
206	Kab. Luwu Timur	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
207	Kab. Toraja Utara	-	-	-	-	-	-	29.804.800	496.400	-	-	-	-	-	30.301.200
208	Kab. Mamuju Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	2.240.000	-	-	-	-	2.240.000
209	Kab. Bombana	274.716.728	75.506.280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350.223.008
210	Kab. Kolaka	-	3.434.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.434.658
211	Kab. Kolaka Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.821.194
212	Provinsi Bali	-	-	446.142.032	12.392.833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458.534.865

(dalam rupiah)

NO.	DAERAH	DBH Pajak										DBH SDA Minyak Bumi		DBH SDA Gas Bumi		DBH SDA Pertambangan Umum		DBH SDA Kehutanan		JUMLAH
		611111	611112	611121/611122	611123/611124	612111	612112	612211	612212	612311	612312	612312	612511	612512	612516					
		PPH Pasal 21	PPH Pasal 25/29	PBB	BP PBB	Minyak 15%	Minyak 0,5%	Gas 30%	Gas 0,5%	Iuran Tetap	Royalti	IUPPH	PSDH	DR						
213	Kab. Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.096.210					
214	Kab. Buleleng	-	-	175.019.157	6.077.053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	927.760.122					
215	Kab. Tabanan	-	-	896.627.232	31.132.890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821.281.476					
216	Kota Denpasar	-	-	793.721.696	27.559.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.802.033					
217	Kab. Lombok Barat	-	-	201.795.253	7.006.780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828.747.621					
218	Kab. Lombok Tengah	742.978.259	-	85.769.362	-	-	-	-	-	2.074.450	-	-	-	-	2.074.450					
219	Kab. Sumbawa	-	-	7.829.587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.829.587					
220	Kab. Sumbawa Barat	-	-	11.386.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.386.413					
221	Kab. Alor	91.906.844	-	39.852.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.759.564					
222	Kab. Belu	305.387.686	-	62.236.988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367.624.674					
223	Kab. Ende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.628.093					
224	Kab. Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	10.628.093	-	-	-	-	10.628.093					
225	Kab. Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-	1.330.379	-	-	-	-	1.330.379					
226	Kab. Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	12.818.400	-	-	-	-	12.818.400					
227	Kab. Sumba Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.275.332					
228	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.643.498					
229	Kab. Rote Ndao	36.504.027	-	18.733.671	-	-	-	-	-	17.701.810	-	-	-	-	55.237.698					
230	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	32.226.880	-	-	-	-	32.226.880					
231	Kab. Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.058.196.404					
232	Provinsi Maluku	-	-	-	-	1.022.686.458	-	-	-	-	-	-	-	-	3.763.200.000					
233	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.640.000					
234	Kab. Maluku Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	9.796.080	-	-	-	-	752.640.000					
235	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.640.000					
236	Kab. Buru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.640.000					
237	Kota Ambon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.640.000					
238	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.640.000					
239	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.640.000					
240	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.640.000					
241	Kota Tual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752.640.000					
242	Kab. Buru Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.171.495.257					
243	Kab. Maluku Barat Daya	-	-	-	-	406.167.673	-	-	-	-	-	-	-	-	7.526.400.000					
244	Provinsi Maluku Utara	8.190.132.049	375.735.476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.565.867.525					
245	Kab. Halmahera Tengah	823.466.693	18.833.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842.300.691					
246	Kab. Halmahera Barat	412.526.134	16.696.361	-	-	-	-	-	-	27.928.320	-	-	-	-	457.150.815					
247	Kota Ternate	5.665.930.245	96.034.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.761.964.623					
248	Kab. Halmahera Timur	576.087.430	18.234.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594.321.925					
249	Kota Tidore Kepulauan	1.159.863.033	333.071.537	-	-	-	-	-	-	7.168.000	-	-	-	-	1.706.231.877					
250	Kab. Kepulauan Sula	776.612.323	22.227.242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	798.839.565					
251	Kab. Halmahera Selatan	771.279.603	25.277.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796.557.463					
252	Kab. Halmahera Utara	1.626.139.125	14.356.189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.857.127.866					
253	Kab. Pulau Morotai	473.293.475	18.871.146	-	-	-	-	-	-	13.324.640	-	-	-	-	2.056.335.509					
254	Kab. Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	25.127.360	-	-	-	-	25.127.360					
255	Kab. Jayawijaya	-	-	4.387.713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.387.713					
256	Kab. Merauke	324.071.269	183.426.737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	507.498.006					
257	Kab. Mimika	3.472.149.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.472.149.463					
258	Kab. Nabire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.866.709					
259	Kab. Kepulauan Yapen	-	-	-	-	-	-	-	-	16.789.920	-	-	-	-	16.789.920					
260	Kota Jayapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.161.248					
261	Kab. Yahukimo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.230.080					
262	Kab. Tolikara	-	-	-	-	-	-	-	-	10.230.080	-	-	-	-	10.230.080					
263	Kab. Mamberamo Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	29.037.583	-	-	-	-	29.037.583					
264	Kab. Lanny Jaya	-	-	1.820.774.889	56.899.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.877.674.105					
265	Kab. Nduga	-	-	142.158.298	4.442.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.600.745					
266	Kab. Intan Jaya	-	-	1.019.511.909	31.859.747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.051.371.656					
267	Kab. Deiyai	57.349.231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.499.838					
															57.349.231					

(dalam rupiah)

halaman 5 dari 6

NO.	DAERAH	DBH Pajak					DBH SDA Minyak Bumi			DBH SDA Gas Bumi		DBH SDA Pertambangan Umum			DBH SDA Kehutanan			JUMLAH	
		611111	611112	611121/611122	611123/611124	612111	612112	612211	612212	612311	612312	612511	612512	612516	612517	612518	612519		
268	Provinsi Papua Barat	PPH Pasal 21	PPH Pasal 25/29	PBB	BP PBB	Minyak 15%	Minyak 0,5%	Gas 30%	Gas 0,5%	Juran Tetap	Royalti	IUPH	PSDH	DR	-	-	-	855.777.364	
269	Kab. Sorong	476.151.021	379.626.343	-	-	-	-	-	-	22.185.065	-	-	-	-	-	-	-	22.185.065	
270	Kab. Manokwari	1.320.565.613	85.074.907	-	-	-	-	-	-	14.926.450	-	-	-	-	-	-	-	1.420.566.970	
271	Kab. Fak Fak	-	-	-	-	-	-	-	-	8.148.000	-	-	-	-	-	-	-	8.148.000	
272	Kab. Sorong Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	46.908.260	-	-	-	-	-	-	-	46.908.260	
273	Kab. Teluk Bintuni	7.432.280.095	17.663.445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.449.943.540	
274	Kab. Maybrat	1.468.062	8.984.825	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.452.887	
275	Kab. Tambora	1.224.700	8.834.919	19.765.522	741.207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.556.348	
	JUMLAH	151.729.745.315	19.534.594.639	177.946.319.737	6.000.027.415	-	-	2.523.927.482	42.057.106	1.819.818.861	20.268.186.733	492.896.178	-	-	-	-	-	654.308.229	
																			381.011.881.695

(dalam rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM

SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
BERLIN PANJAITAN
NIP 19571207 198003 1 001

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

ttd.

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP 19590606 198312 1 001